

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat sekarang ini lingkungan kita masuk pada kondisi krisis dan rusak di mana-mana. Krisis lingkungan ini tidak hanya menyerang lingkungan fisik seperti air, tanah, udara dan iklim, tetapi juga krisis lingkungan biologis dan krisis lingkungan sosial. Persoalan kerusakan lingkungan ini, lagi-lagi disebabkan oleh perilaku manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup ekonomisnya yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan. Demi mengikuti nafsu manusianya yang tidak pernah puas, akhirnya lingkungan pun dikorbankan. Beragam bencana alam telah menjadi pemandangan yang memilukan dan sering kita saksikan dan rasakan, dengan menyisakan penderitaan dan kerugian yang tak terhitung nilainya.

Bencana-bencana yang terjadi di negeri ini tidak terlepas dari banyaknya pencemaran dan perusakan yang dilakukan oleh manusia. Pencemaran lingkungan hidup menurut pasal 1 ayat 14 UU No. 32 Tahun 2009, adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku kerusakan lingkungan hidup. Sementara itu perusakan berdasarkan pasal 1 ayat 16 UU No. 32 tahun 2009, adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku

kerusakan lingkungan. Menurut Abetnego Tarigan, direktur eksekutif eknas WALHI tahun 2012 mengatakan bahwa bencana alam dan bencana ekologis itu berbeda. Bencana alam disebabkan oleh alam itu sendiri sedangkan bencana ekologis disebabkan oleh tindakan manusia yang tidak menghargai lingkungan.

Table 1.1

Kejadian Bencana di Indonesia

No	Bencana	Total Kejadian
1.	Banjir	737
2.	Puting beliung	651
3.	Tanah longsor	577
4.	Kebakaran hutan dan lahan	96
5.	Banjir dan tanah longsor	67
6.	Kekeringan	19
7.	Gempa bumi	18
8.	Abrasi	8
9.	Letusan gunung	2

Sumber : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Data kejadian bencana di Indonesia di atas adalah data yang didapatkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa total telah terjadi 2.175 kejadian bencana sepanjang tahun 2017 yang terjadi di Indonesia. Banjir

menjadi bencana yang paling banyak terjadi di Indonesia. Pramudia Sunu (2001, 77) menyatakan bahwa terdapat dua jenis bencana akibat rusaknya daya dukung lingkungan. Pertama, kerusakan yang berasal dari alam itu sendiri. Kedua, kerusakan karena faktor eksternal, yaitu kerusakan lingkungan yang berasal dari perilaku manusia. Terutama beralasan demi meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup.

Kerusakan-kerusakan lingkungan hidup yang terjadi saat ini telah menimbulkan masalah-masalah sosial seperti pengabaian hak-hak asasi rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat, marginalisasi dan pemiskinan. Oleh karenanya, masalah lingkungan hidup harus didudukkan sebagai masalah sosial. Peran lembaga lingkungan yang menggerakkan penyelamatan lingkungan sangat diperlukan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) adalah salah satu lembaga non profit terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang lingkungan.

WALHI menilai kecendrungan kerusakan lingkungan hidup saat ini semakin massif dan kompleks baik di pedesaan maupun di perkotaan. Kondisi lingkungan yang memburuk ini secara terbuka diakui mempengaruhi dinamika sosial politik dan sosial ekonomi masyarakat baik ditingkat komunitas, regional maupun nasional. Perkembangannya mulai massif dengan munculnya WALHI di berbagai kota sebagai salah satu bentuk dari jaringan pergerakan WALHI guna mengakomodir semua permasalahan lingkungan di Indonesia.

WALHI Sumatera Barat sendiri lahir pada tanggal 16 Oktober 1996, dilatar belakangi oleh maraknya kegiatan eksploitasi lingkungan hidup di provinsi Sumatera

Barat yang dilakukan berbagai pihak baik pemerintahan maupun swasta yang tidak melibatkan masyarakat secara langsung. Akibat dari hal tersebut kerusakan dan tekanan terhadap lingkungan di Sumatera Barat menjadi semakin tidak terkendalikan. Kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada kelompok tertentu, sikap arogansi pemerintah dan pihak perusahaan serta ketidakberdayaan masyarakat. Semua kondisi ini sangat merugikan dan menempatkan rakyat pada posisi yang selalu ditekan.

Sepanjang tahun 2018, terjadi 20 kasus konflik Sumber Daya Alam (SDA) pada 80.637 hektar lahan di Sumatera Barat yang melibatkan perebutan ruang wilayah kelola rakyat. Dari konflik-konflik sumber daya alam itu yang terbesar terjadi di sektor hutan dan lahan, tercatat 8 kasus yang memperebutkan 49.407 hektar hutan dan lahan. Disusul sektor tambang dan energi, pada sektor ini terjadi 5 kasus yang berada pada 29.840 hektar lahan. Serta sektor pembangunan Infrastruktur, 7 kasus di lahan seluas 1.190 hektar (sumber: Infografis Organisasi Masyarakat Sipil Sumatera Barat, 2018).

Dukungan penuh pemanfaatan lingkungan sesungguhnya ada dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan tentang lingkungan. Seperti pada pasal 28 H ayat 1 UUD 1945, dijelaskan, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”. Kemudian, Undang-Undang NO 4 Tahun 1982 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang kemudian disempurnakan dengan keluarnya UU NO. 23 tahun 1997. Kemudian UU NO. 32 Tahun 2009 yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sementara itu, terdapat undang-

undang lainnya terkait UU hutan, pengelolaan sampah, tanah, ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Belum lagi pasal-pasal pidana yang mengatur kejahatan lingkungan. Hanya pada praktiknya, Undang-Undang tersebut belum dimanfaatkan secara baik. Masih banyak terjadi pelanggaran dalam implementasinya di sana-sini.

Tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang belum baik juga terlihat dari masih adanya kasus-kasus kerusakan lingkungan seperti illegal logging, pembabatan hutan mangrove, pembangunan di kawasan hutan. Kerusakan lingkungan dan krisis ekologi terjadi salah satunya karena masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha sektor sumber daya alam yang melanggar aturan, disamping juga minimnya pengawasan.

Melihat kompleksitas persoalan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial maka langkah-langkah pemberdayaan berbasis partisipasi masyarakat perlu dirumuskan. Esensipemberdayaan, yaitu memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan pada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam dan memengaruhi kehidupan dari masyarakatnya (Jim Iff dalam Zubaedi, 2008 : 98). Satu persoalan yang mendasar yang menjadi penyebab tidak terpeliharanya lingkungan, banyak kelompok masyarakat yang masih mempunyai pikiran lebih baik bertindak untuk kepentingan hari ini dari pada memikirkan masa depan lingkungan.

Pada konteks pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) atau perubahan lingkungan, masyarakat sering terpinggirkan atau sebagai korban perubahan-perubahan lingkungan. Baik Negara maupun investor seringkali terlibat pada proses

“mengeksklusi” kelompok masyarakat yang lemah. Sekalipun masyarakat lokal sudah mengajukan keberatan berkali-kali dan sikap penolakan sudah nyaring terdengar di mana-mana, tetapi gerakan sosial yang dibangun selalu kandas di tengah jalan (Dwi Susilo Rachmad K, 2012 : 243)

Sebagai organisasi lingkungan hidup, WALHI Sumatera Barat menjadi aktor penggerak masyarakat dalam penyelamatan lingkungan. Advokasi merupakan salah satu upaya WALHI Sumatera Barat dalam menyelesaikan kasus-kasus pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Ada tiga isu advokasi strategis yang dimandatkan kepada WALHI Sumatera Barat, yaitu advokasi tambang dan energi, advokasi kedaulatan pangan dan kehutanan sosial serta ekspansi perkebunan besar dan Advokasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pengurangan resiko bencana.

Advokasi yang telah dilaksanakan oleh WALHI Sumatera Barat yaitu advokasi tambang dan energi. Upaya advokasi tambang dan energi berfokus pada investigasi, studi, pendampingan masyarakat dan kampanye terhadap energi kotor batubara. Seperti yang kita ketahui kota Sawahlunto dikenal sebagai kota tambang batubara. Banyak perusahaan tambang telah berdiri di kota Sawahlunto, salah satunya pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Ombilin, yang menggunakan batubara sebagai bahan bakarnya. PLTU Ombilin ini sendiri sudah menjadi salah satu sumber penerangan penting di wilayah sumatera tengah, yang menjadi sorotan penting saat ini adalah mengenai limbah PLTU tersebut.

PLTU Ombilin yang telah memasuki usia 23 tahun, banyak memberi dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Bahkan, kondisi itu saat ini semakin parah

lantaran adanya pencemaran kualitas udara yang diakibatkan oleh semburan abu dari sisa pembakaran serta ditemuinya gunung limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Limbah B3 itu dianggap WALHI menjadi ancaman serius bagi ekologi dan keberlanjutan ekosistem di sekitar PLTU. WALHI mencatat, pada bulan Mei 2019 kondisi pencemaran kualitas udara yang disebabkan oleh abu hitam pekat yang keluar dari cerobong asap PLTU Ombilin itu, sempat mendapat protes keras dari masyarakat setempat. Hingga kini persoalan itu masih belum terselesaikan (Viva, 28 juni 2019).

Data WALHI Sumatera Barat mengungkap polusi udara telah melampaui ambang batas, kejadian ini telah berulang sejak tahun 2012 disebabkan kerusakan penyaringan cerobong asap, tahun 2017 kerusakan pada mesin pembuangan sisa pembakaran. Pencemaran udara juga ditimbulkan dari tempat penumpukan sisa pembakaran yang tidak terkelola. Berdasarkan alat pengukur kualitas udara Airvisual yang dipasang oleh LBH Padang dan Greenpeace Indonesia di sekitar PLTU, indeks kualitas udara berada pada posisi bahaya. Kualitas udara 408 dengan PM 2,5 sebesar 376 mikrogram per meter kubik. Sedangkan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang baku mutu pembangkit listrik tenaga termal, ambang batas PM 2,5 adalah 100 mikrogram per meter kubik. Temuan lapangan WALHI Sumatera Barat pada tahun 2018 jumlah penderita ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) dan iritasi pada mata juga meningkat setiap bulannya berdasarkan data puskesmas Talawi, hal tersebut tidak tertutup kemungkinan akan tetap berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

1.2. Rumusan Masalah

Sebenarnya jika sumber daya alam dimanfaatkan kalau hanya mengikuti kebutuhan masing-masing secara individu, ia akan memiliki kemampuan meregenerasi dengan sendirinya. Hanya yang terjadi, penggunaan sumber daya alam tidak memerhatikan daya dukung lingkungan, akibatnya lingkungan rusak dimana-mana dan besar kemungkinan tidak terselamatkan, persoalan ini logis terjadi. Jumlah populasi manusia yang meningkat, jelas akan diikuti meningkatnya konsumsi atas Sumber Daya Alam (SDA). Agar batas daya dukung tidak terlampaui, maka di upayakan agar laju konsumsi sumber daya dan pencemaran tidak menurun relatif terhadap kenaikan kualitas lingkungan hidup. Jadi syarat kenaikan kualitas hidup harus diupayakan bersama dengan ditekannya konsumsi Sumber Daya Alam (SDA) dan pencemaran (Philip Kristanto dalam Rahmad K.Dwi Susilo, 2012: 69).

WALHI(Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) menjadi salah satu LSM atau NGO garda depan yang memfokuskan diri pada isu-isu lingkungan. WALHI dengan semangat untuk mengangkat isu-isu lingkungan dan memberikan advokasi kepada masyarakat yang lingkungannya mengalami kerusakan akibat dari eksploitasi dan modernisasi yang saat ini tengah marak terjadi. Untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari dibutuhkan kontribusi dari semua pihak, termasuk masyarakat. Oleh karena itu sangat penting sekali masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam upaya penyelamatan lingkungan, sehingga lingkungan yang kita diami tidak mengalami pengrusakan. Untuk itu penting rasanya melihat WALHI sebagai LSM lingkungan

dalam menggerakkan masyarakat secara aktif terlibat dalam upaya penyelamatan lingkungan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mempunyai sifat yang sangat penting, alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat yang sangat penting. Pertama, karena partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek pembangunan akan gagal. Alasan kedua, yang mendorong partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri (Conyers, 1984: 154)

Pentingnya partisipasi sangat diperlukan dalam upaya penyelamatan lingkungan. Dengan adanya partisipasi, kerusakan dan pelanggaran lingkungan dapat sedikit diminimalisir. Adanya keterlibatan masyarakat luas sebagai kontrol dalam menjaga lingkungan hendaknya memberikan sedikit ruang bagi para perusak lingkungan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dibutuhkan juga upaya penyadaran akan dari bencana perusakan lingkungan. Disinilah peran lembaga yang bergerak di bidang lingkungan, khususnya WALHI dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan dampak kerusakan lingkungan. Advokasi adalah salah satu pendekatan untuk menyadarkan

masyarakat bahwasanya kerusakan lingkungan telah terjadi di lingkungan sekitar mereka.

WALHI Sumatera Barat telah mendapatkan mandat untuk melakukan kegiatan advokasi pada Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) VI tahun 2014. Advokasi itu sendiri merupakan fokus dari kegiatan WALHI Sumatera Barat pada isu-isu persoalan lingkungan. Salah satu advokasi yang telah dilaksanakan oleh WALHI Sumatera Barat yaitu advokasi tambang dan energi. Upaya advokasi tambang dan energi berfokus pada investigasi, studi, pendampingan masyarakat dan kampanye terhadap energi kotor batubara.

Kota Sawahlunto Profinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia. PLTU Ombilin yang terletak di desa Sijantang berada sejauh lebih kurang 15 Km dari Kota Sawahlunto. Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin ini kembali mendapatkan sorotan tajam dari WALHI Sumatera Barat. WALHI menilai PLTU Ombilin banyak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Pencemaran kualitas udara yang disebabkan sisa pembakaran serta ditemuinya gunung limbah bahan berbahaya dan beracun (b3). Berdasarkan alat pengukur kualitas udara airvisual yang dipasang LBH Padang dan Greenpeace Indonesia disekitar PLTU, indeks kualitas udara berada di posisi bahaya. Keberadaan limbah B3 juga dinilai menjadi ancaman serius bagi ekologi dan keberlanjutan ekosistem di sekitar lokasi PLTU.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah **“Bagaimana Upaya WALHI dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Penyelamatan Lingkungan, khususnya bidang Advokasi Tambang Dan Energi di PLTU Ombilin Kota Sawahlunto?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1.1.1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Upaya WALHI Sumbar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penyelamatan lingkungan, studi advokasi tambang dan energi di PLTU ombilin kota Sawahlunto.

1.1.2. Tujuan Khusus

Dalam mencapai tujuan umum penelitian ini, peneliti memiliki beberapa tujuan khusus yang dicapai. Tujuan khususnya ialah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan Upaya WALHI Sumatera Barat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penyelamatan lingkungan pada bidang advokasi tambang dan energi di PLTU ombilin kota Sawahlunto.
- b. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dari advokasi tambang dan energi di PLTU ombilin, kota Sawahlunto.
- c. Mendeskripsikan hasil dari upaya advokasi tambang dan energi di PLTU ombilin, kota Sawahlunto.yang dilakukan oleh WALHI Sumatera Barat

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaatnya antara lain sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan kita tentang Upaya WALHI dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penyelamatan Lingkungan.

2. Secara Praktis

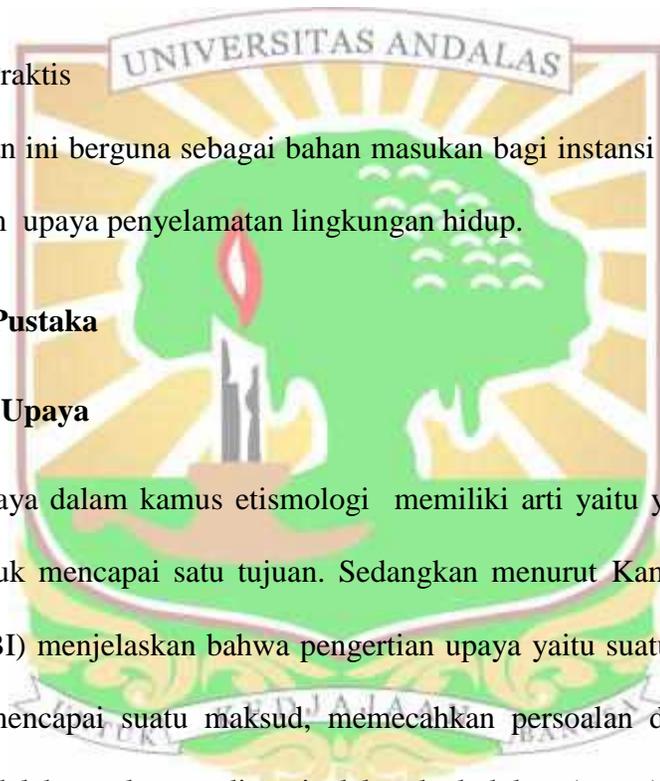
Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dan pihak-pihak lain dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Konsep Upaya

Kata upaya dalam kamus etimologi memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai satu tujuan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar. upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya (Soekamto 1984: 237).

Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008: 1787), mengupayakan adalah mengusahakan, mengikhtiarkan, mencari sesuatu untuk



mencari akal (jalan keluar) dan sebagainya. kesimpulannya upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Upaya juga dapat dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara, juga dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul. Upaya yang dimaksud oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu usaha yang dilakukan oleh WALHI Sumatera Barat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar demi menyelamatkan lingkungan.

1.5.2. Konsep WALHI sebagai Fasilitator

Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. Posisi fasilitator hanyalah mempermudah proses pembelajaran agar lancar sampai tujuan yang disepakati bersama, karena tujuan belajar bukan milik fasilitator, ia adalah milik semua orang yang terlibat dalam proses pembelajaran bersama. Seorang fasilitator memiliki tugas menciptakan suasana yang nyaman, menciptakan kondisi supaya setiap peserta merasa tertarik dan enak untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya dan posisi fasilitator memberikan tugas untuk memancing agar partisipasi muncul. Partisipasi masyarakat dalam penyelamatan lingkungan juga sangat penting, disinilah

peran WALHI sebagai fasilitator dibutuhkan untuk dapat meningkatkan semangat dan partisipasi masyarakat.

Wahana lingkungan hidup Indonesia atau WALHI adalah lembaga yang lahir dengan semangat untuk mengangkat isu-isu lingkungan dan memberikan advokasi kepada masyarakat yang lingkungannya mengalami kerusakan akibat dari eksploitasi dan modernisasi yang saat ini tengah marak terjadi. Sebagai organisasi lingkungan hidup, WALHI telah sering mendapatkan pengaduan-pengaduan dari masyarakat terkait dengan kerusakan dan pencemaran yang terjadi di daerah mereka. Untuk merespon dugaan kerusakan tersebut WALHI akan menggandeng mitranya untuk memfasilitasi penyelesaian tersebut. WALHI telah menjadi salah satu LSM atau NGO garda depan yang memfokuskan diri pada isu-isu lingkungan.

NGO (*Non-Governmental Organisation*) secara harfiah diartikan sebagai organisasi non-pemerintahan. Mengacu pada pengertian PBB, NGO didefinisikan sebagai kelompok masyarakat berbasis kesukarelaan dan non-profit yang dikelola dalam level lokal maupun internasional dengan isu spesifik yang berbeda dalam setiap NGO tergantung pada kepentingannya dengan cara menyalurkan suara masyarakat kepada pemerintah, melakukan advokasi dan pemantauan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemangku kepentingan dan juga mendorong partisipasi politik yang aktif bagi masyarakat. WALHI adalah salah satu NGO besar yang fokus pada isu lingkungan hidup.

Pemajuan kualitas hidup, sesuai diamanatkan dalam Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam pasal 65 ayat (5) menyebutkan bahwa setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Sesuai aturan tersebut, tim fasilitasi penanganan pengaduan lingkungan hidup bekerja melakukan penelaahan, yaitu melakukan identifikasi, klarifikasi, menghimpun informasi, verifikasi dan riwayat penataan dari pengaduan permasalahan lingkungan hidup. Tim bekerja melakukan verifikasi administrasi dan turun ke lapangan guna memeriksa kebenaran pengaduan.

Proses penyelamatan lingkungan yang dilakukan oleh WALHI akan menggandeng mitranya, memberikan rekomendasi bahwa telah terjadinya dan atau terpenuhinya unsur pelanggaran-pelanggaran terhadap sanksi administrasi dan keperdataan di bidang lingkungan kepada gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Kemudian menetapkan jenis penerapan hukum terhadap pelanggaran lingkungan yang dilakukan, meliputi penerapan sanksi administrasi, penerapan hukum perdata, penyelesaian lingkungan hidup di luar pengadilan dan penerapan hukum pidana.

1.5.3. Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Penyelamatan Lingkungan

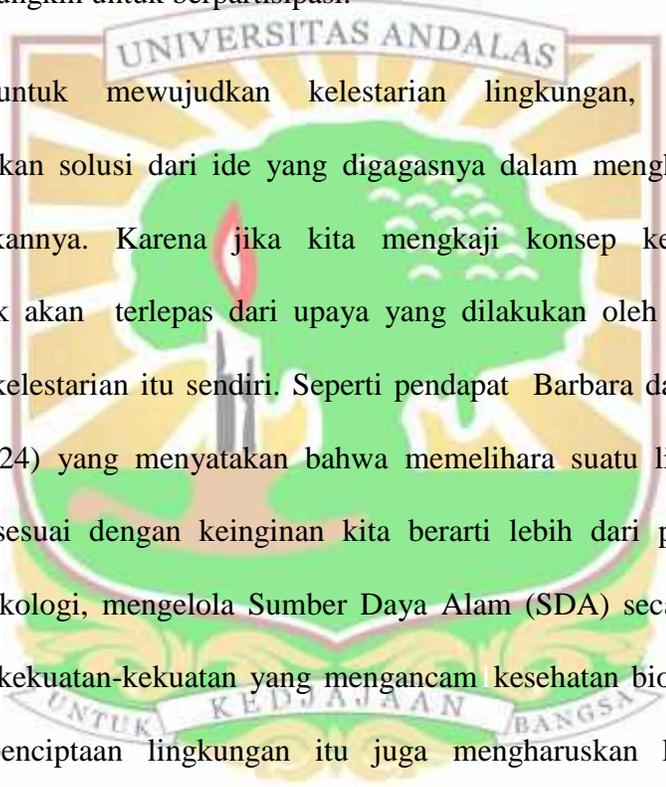
Ketika kita menyebutkan kata partisipasi tentu akan muncul pemahaman tentang pengertian kata partisipasi itu sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata partisipasi di artikan sebagai perihal turut berperan serta

dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Dalam Bahasa Inggris “*participation*” adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan “*participatie*” yang artinya penyertaan. Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa partisipasi merupakan peran serta terhadap suatu hal.

Pada dasarnya konsep partisipasi adalah membangkitkan setiap warga untuk terjun dalam pembangunan negara. Hal seperti ini seperti yang di ungkapkan oleh Adisasmita (2006: 42) perihal konsep partisipasi itu sendiri adalah “keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dikerjakan. Hal ini melihat kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkontribusi dan berkorban dalam pelaksanaan program pembangunan tersebut sangat berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan.

Jika melihat upaya WALHI kepada masyarakat sebetulnya merupakan produk sederhana yang tidak memerlukan materi yang berlimpah, hanya saja konsep membangkitkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menangani masalah kerusakan lingkungan, sesungguhnya tidak lepas dari berpartisipasi atau tidaknya masyarakat. Agar dapat memunculkan partisipasi dari masyarakat tidaklah mudah. Menurut Dusseldorp (dalam Hamdika 2014: 18), partisipasi muncul melalui tiga prasyarat. Pertama, membangkitkan kesadaran (*awareness*), yaitu masyarakat menyadari bahwa situasi sekarang tidak memuaskan, tidak sesuai dengan tujuan

mereka. Kedua, meyakinkan masyarakat (*convince*), masyarakat harus diyakinkan bahwa keuntungan berkaitan dengan proses pembangunan direncanakan dan partisipasi mereka lebih besar dari biayanya. Ketiga masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat dalam beberapa tahap dari proses pembangunan yang direncanakan. Masyarakat akan berpartisipasi bila dari konteks sosial dan politik membuatnya mungkin untuk berpartisipasi.



Maka untuk mewujudkan kelestarian lingkungan, WALHI harus mempertimbangkan solusi dari ide yang digagasnya dalam menghadapi tantangan jika menyebarkannya. Karena jika kita mengkaji konsep kelestarian secara mendalam, tidak akan terlepas dari upaya yang dilakukan oleh si pelaku dalam mengusahakan kelestarian itu sendiri. Seperti pendapat Barbara dan Dubos (dalam Apudin, 2008: 24) yang menyatakan bahwa memelihara suatu lingkungan hidup manusia yang sesuai dengan keinginan kita berarti lebih dari pada memelihara keseimbangan ekologi, mengelola Sumber Daya Alam (SDA) secara ekonomi dan mengendalikan kekuatan-kekuatan yang mengancam kesehatan biologi dan mental. Secara ideal penciptaan lingkungan itu juga mengharuskan kelompok sosial mendapatkan kesempatan mengembangkan cara hidup dan alam sekitarnya menurut pilihan mereka masing-masing. Manusia bukan hanya hidup dan berfungsi di dalam lingkungannya tetapi juga membentuknya dan di bentuk olehnya. Sebagai akibat umpan balik yang terus menerus antara manusia dengan lingkungannya.

Jika kita menyoroti pendapat di atas, makna memelihara sesungguhnya adalah bentuk partisipasi yang harus diusahakan oleh masyarakat itu sendiri, hal terhadap itu pun diungkapkan oleh Sanoff (2000: 9-10) yang berpendapat bahwasanya tujuan utama partisipasi adalah melibatkan hak suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mendorong dan melibatkan masyarakat serta menyatukan. Dimana proses integrasi antara negara dan masyarakat adalah akar utama mengapa program partisipasi sangat dibutuhkan dalam pembangunan, kedua elemen tersebut saling melengkapi satu sama lain.

Pembangunan merupakan upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rayat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin sehingga penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara memberikan keyakinan bagi bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai, bila didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan tuhan, dengan sesama manusia maupun dengan alam. Manusia, masyarakat dan lingkungan hidup memiliki hubungan timbal balik yang harus selalu dibina dan dikembangkan agar tetap dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan yang dinamis.

Esensi pemberdayaan yaitu memberikan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan

mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan dari masyarakat. Agar dapat membangun pemberdayaan terdapat model-model yang harus diterapkan dalam pemberdayaan lingkungan tersebut, Susilo (2012: 235) bahwasanya ada empat model dalam pemberdayaan masyarakat terhadap lingkungan yaitu membangun kesadaran ekologis, membangun dan menguatkan kelembagaan lokal, membangun kemitraan, dan yang terakhir adalah perlawanan sebagai bentuk pemberdayaan.

1.5.4. Konsep Advokasi

Advokasi dapat dikatakan suatu aksi yang strategis dan terpadu yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok untuk memasukkan suatu masalah ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya advokasi bertujuan untuk mengupayakan solusi bagi suatu masalah melalui penegakan hukum dan penerapan kebijakan publik untuk mengatasi masalah tersebut. Advokasi melibatkan strategi yang dilakukan semata-mata untuk menyelesaikan sengketa antar orang maupun antar kelompok. Sehingga kegiatan advokasi sendiri memang sangat berkaitan erat dengan hukum. Advokasi dapat hadir melalui beberapa tingkatan mulai dari lokal, nasional, dan internasional.

Advokasi dikategorikan menjadi tiga jenis:

a. Advokasi diri

Advokasi diri yaitu aplikasi yang dilakukan pada skala lokal dan dalam lingkup kecil.

b. Advokasi kasus.

Kategori advokasi kasus yaitu advokasi yang dilakukan sebagai proses pendampingan terhadap seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang belum memiliki kemampuan untuk membela diri sendiri maupun membela kelompoknya.

c. Advokasi hukum

Advokasi hukum merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh lembaga atau ahli hukum dalam bentuk konsultasi, mediasi, negosiasi serta pendampingan. Advokasi dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang berdimensi hukum.

Advokasi adalah suatu bentuk tindakan yang mengarah pada pembelaan, memberi dukungan atau rekomendasi berupa dukungan, atau rekomendasi berupa dukungan aktif. Advokasi terkait kasus lingkungan hidup tentu lebih berat karena harus bersinggungan dengan berbagai kepentingan bisnis dan politik yang melibatkan berbagai aktor besar. Atas dasar itu pula, aktivis lingkungan menjalankan aktivitas advokasinya kerap harus menyembunyikan identitas, atau harus menyembunyikan tujuan utama (kamufase). Tidak jarang kegiatan advokasi lingkungan hidup yang dilakukan, kerap melahirkan teror dari berbagai pihak yang merasa kepentingannya terganggu. Advokasi lingkungan butuh banyak waktu, tenaga dan sumber daya manusia yang handal. Tiap kali hendak melakukan advokasi, harus menghitung kekuatan pendanaan, kekuatan dokumen, serta kemampuan sumber

daya manusia yang diturunkan ke lapangan. Ketigannya harus saling menguatkan. Satu saja pincang, maka advokasi dipastikan gagal.

1.5.5. Tinjauan Sosiologis

Lingkungan dan kehidupan sosial tidak bisa dipisahkan. Lingkungan memiliki andil penting dalam kehidupan manusia. Manusia tidak bisa bebas mengembangkan diri tanpa menyesuaikan dengan lingkungan atau dalam arti lain, kebebasan manusia pasti sedikit banyaknya akan dibatasi oleh lingkungan. John J. Macionis menyatakan para ilmuwan sosiologi bisa menjelaskan hubungan antara masyarakat dan lingkungan karena masalah lingkungan muncul tidak dengan sendirinya, melainkan sebagai akibat tindakan khusus yang diperbuat manusia.

Interaksi antar manusia dengan lingkungan terus berlanjut. Masyarakat menyadari bahwa merusak lingkungan ternyata sama dengan halnya mereka tidak memikirkan masa depan lingkungan. Rusaknya lingkungan dan terjadinya bencana alam yang tidak terhindarkan, menyadarkan sebagian mereka akan rusaknya sistem sosial kita, cepat atau lambat. Angin segar dengan ditandai dengan maraknya kesadaran ekologis (*ecological awareness*) menjadi stimuli yang cukup cerdas bagi kemunculan paham-paham anti tesis yang juga melawan antroposentrisme. Paham-paham pejuang lingkungan yang sudah masuk ke ranah teoritis, etika, dan praksis tersebut yakni biosentrisme, ekosentrisme (*the deep ecology*), dan ekofeminisme.

Upaya WALHI dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penyelamatan lingkungan dapat dijelaskan dengan paham ekosentrisme (*the deep*

ecology), yaitu paham yang memperjuangkan lingkungan. Paham ini pertama kali diungkap oleh filsuf Norwegia yaitu Arne Naess, pada tahun 1972. Ia menyatakan bahwa semua bentuk kehidupan berhak hidup di dunia. Menurut penganut paham ini, perjuangan dan penyelamatan lingkungan alam tidak hanya mengutamakan penghormatan atas spesies (makhluk hidup saja), tetapi yang tidak kalah penting pula adalah perhatian setara atas seluruh kehidupan.

Banyak kalangan menyamakan antara ekosentrisme dengan *ecophilosophy*, yakni aliran filsafat yang memiliki pandangan holistic atau pandangan komprehensif atas kemanusiaan dan situasi individual di sekitar kita. Komprehensif dimaksudkan, meliputi keseluruhan konteks global dengan kita berada di dalamnya, bersama-sama dalam sebuah dunia dengan kehidupan dan kebudayaan yang beragam. Sebagai paham yang peduli terhadap lingkungan, kemunculan ekosentrisme tidak lepas dari dua latar belakang. Kemunculannya merupakan tanggapan atas pandangan-pandangan filsafat antroposentrisme yang terbukti tidak ramah atau tidak bijak mengatur hubungan manusia dengan alam. Fenomena krisis ekologi tidak lepas dari semakin kuatnya antroposentrisme dalam mengarahkan hubungan manusia dengan lingkungan yang dalam kenyataannya memproduksi kerusakan-kerusakan.

Ekosentrisme memandang hubungan antara alam dan kehidupan sosial dengan pokok-pokok gagasan sebagai berikut: pertama, manusia dan kepentingannya bukan lagi ukuran bagi sesuatu yang lain. Ia tidak hanya melihat spesies manusia saja, tetapi juga memandang spesies lain. Pernyataan ini sekaligus menunjukkan bahwa ekosentrisme tidak setuju dengan nilai-nilai normative yang dibawa oleh

antroposentrisme. Kedua, pandangan tentang lingkungan harus bersifat praktis. Artinya, etika ini menuntut suatu pemahaman baru tentang relasi yang etis dalam alam semesta (terutama antara manusia dengan makhluk yang lain) disertai prinsip-prinsip yang diterjemahkan dalam gerakan lingkungan.

Prinsip-prinsip *deep ecology* adalah sebagai berikut:

- a. Kesejahteraan dan kemajuan kehidupan manusia dan nonmanusia di bumi memiliki nilai dalam diri mereka. Nilai-nilai ini bebas dari ketidakberuntungan dunia nonmanusia bagi tujuan manusia,
- b. Kekayaan dan keragaman bentuk-bentuk hidup memberikan sumbangan pada realisasi nilai-nilai ekologis ini dan juga nilai-nilai dalam diri mereka. Manusia tidak memiliki hak untuk mereduksi kekayaan dan keragaman ini kecuali untuk memuaskan kebutuhan manusia yang sangat penting.
- c. Kebudayaan dan kesejahteraan manusia adalah berbanding lurus dengan penurunan kualitas dari populasi. Akibatnya, kesejahteraan kehidupan nonmanusia turun pula.
- d. Campur tangan manusia atas dunia nonmanusia terlalu banyak dan situasi ini dengan cepat mengarah kepada kualitas lingkungan yang semakin buruk.
- e. Oleh karena itu, kebijakan harus diubah. Kebijakan harus menyentuh struktur ideologi, ekonomi dan dasar-dasar teknologi. Kondisi yang diakibatkan dari peristiwa tertentu akan berbeda dengan yang kita alami sekarang.

- f. Perubahan ideologi adalah penting guna mengapresiasi kualitas hidup (berdiam dalam situasi nilai-nilai inheren) lebih daripada melekat dalam standar hidup yang lebih tinggi. Hal ini akan berakibat pada kesadaran atas perbedaan besar (*big*) dan besar (*great*), yaitu kemewahan dan keseimbangan lingkungan.
- g. Ini yang menyumbang kepada poin-poin penting terdahulu yang memiliki kewajiban secara langsung maupun tidak langsung mencoba untuk menerapkan perubahan-perubahan penting.

Sony keraf menyatakan bahwa *deep ecology* bisa dijelaskan sebagai berikut.

- a. Teori normatif, artinya *the deep ecology* bisa dikatakan sebagai cara pandang normatif yang melihat alam semesta dengan segala isinya pada diri sendiri. Sekaligus melalui cara pandang ini, ia memberikan nilai-nilai dan norma-norma tertentu pada alam. Dalam konteks ini bisa dikatakan bahwa pandangan *the deep ecology* memiliki keberpihakan pada penilaian norma yang dimiliki oleh alam dan lingkungan. Berbeda dari pandangan positivisme (dalam kebanyakan *science* yang berkembang selama ini) yang mengklaim bebas nilai (*value free*). Visi *the deep ecology* jelas-jelas berpihak.
- b. Teori kebijakan, yakni cara pandang yang tidak semata-mata diarahkan pada individu tetapi gerakan lingkungan diarahkan pada memengaruhi dan menjiwai setiap kebijakan publik tentang lingkungan. Bisa dinyatakan bahwa perjuangan ekologi melalui *the deep ecology* tidak sedikit diupayakan melalui saluran-saluran politik. Baik memanfaatkan kekuatan

partai politik yang berkuasa maupun memengaruhi dikeluarkan atau tidaknya undang-undang yang menyangkut sumber daya alam dan lingkungan. Karena itu gerakan lingkungan ini tidak berhenti dalam status sebagai wacana saja, melainkan terlibat dalam tindakan-tindakan praksis.

- c. Teori gaya hidup, yakni cara pandang dan norma-norma yang dikampanyekan harus memengaruhi dan merasuki setiap orang, kelompok masyarakat dan seluruh individu sebagai gaya hidup baru.

Aliran ini diikuti oleh banyaknya pejuang-pejuang lingkungan hidup di dunia, Wahana lingkungan hidup Indonesia (WALHI) adalah salah satu lembaga yang juga termasuk ke dalam aliran *Deep Ecology* ini. Hal ini dibuktikan dengan strategi-strategi penyelamatan lingkungan yang dilakukan oleh WALHI itu sendiri. Para penganut paham ekosentrisme ini melakukan perjuangan dan penyelamatan lingkungan alam tanpa membeda-bedakan makhluk hidup dan memberikan perhatian atas seluruh aspek kehidupan. Selain itu masyarakat dalam penelitian ini dibahas dan juga dijelaskan dengan menggunakan teori masyarakat risiko (*risk society*) Anthony Giddens.

Giddens membedakan risiko lingkungan pra modern (tradisional) dan modern. Menurut risikonya kebudayaan tradisional didominasi oleh bahaya dunia fisik, sementara risiko lingkungan modern distrukturasi terutama oleh risiko yang ditimbulkan manusia. Risiko bukan semata-mata tindakan individu. Ada risiko lingkungan yang secara kolektif mempengaruhi massa individu yang besar (Giddens, 1990, dalam Kuper dan Kuper, 2000: 933).

Masyarakat risiko merupakan istilah yang menunjukkan bahwa terjadi perubahan ke kondisi-kondisi baru dalam kehidupan manusia saat ini. Perubahan tersebut ada yang mengarah dari era modernitas menuju modernitas lanjut, dan ada pula perubahan terjadi di era modernitas menuju postmodernitas. Kesimpulannya, perubahan tersebut berubah penting. Konsekuensi yang merujuk pada kesadaran bahwa dalam kehidupan manusia kini lebih diwarnai dan risiko yang sewaktu-waktu dapat mengancamnya. Jadi, hal yang penting dari masyarakat risiko adalah risiko dan cara mengatasi atau mencoba menjadi masalah sentral kehidupan manusia.

Masyarakat risiko di dalam penelitian ini merujuk pada kehidupan masyarakat di sekitar PLTU Ombilin. Adanya PLTU Ombilin sebagai pusat energi di provinsi Sumatera Barat tentunya sebagai ujud pembangunan pasti akan berdampak langsung pada masyarakat di sekitarnya. Kehadiran PLTU tentu memberikan sumbangan yang positif terhadap pembangunan di daerah Sumatera Barat, di sisi lain masyarakat di sekitar PLTU merasakan dampak langsung yang ditimbulkan oleh hadirnya PLTU Ombilin tersebut di wilayah mereka.

1.5.6. Penelitian Relevan

Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat telah dilakukan oleh Wahyu Hamdika (2014) yang berjudul strategi LPMN dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan nagari. Penelitian ini mengkaji bagaimana strategi LPMN dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrembang nagari. Berbeda

dengan kasus yang saya angkat mengenai penyelamatan lingkungan, dimana yang dilihat upaya WALHI dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Sementara itu, penelitian tentang WALHI juga pernah diangkat oleh Aghnia Halim (2016) yang berjudul gerakan sosial baru, studi kasus pola jaringan cinta lingkungan WALHI Yogyakarta. Penelitian ini lebih berfokus kepada jaringan gerakan sosial WALHI. Penelitian ini lebih melihat kepada jaringan yang dimiliki oleh WALHI dalam menguatkan gerakan cinta lingkungan WALHI di Yogyakarta. Sementara penelitian yang saya angkat lebih kepada upaya-upaya apa saja yang dilakukan WALHI dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap Penyelamatan Lingkungan.

1.6. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. penelitian ini memiliki hasil berupa kata-kata lisan, tertulis, maupun tingkah laku dari narasumber sebagai upaya mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena, baik itu yang sedikit sudah diketahui maupun belum sama sekali diketahui. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang dinyatakan secara verbal berpakata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena sosial tertentu dimana peneliti dapat mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.

Di dalam buku Afrizal (2014 : 13) mendefinisikan metode kualitatif sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Afrizal juga menegaskan bahwa dalam metode ini tidak berarti peneliti tabu dengan angka-angka. Artinya, angka-angka tersebut bukanlah data utama dalam penelitiannya, hanya digunakan sebagai pendukung, argumen, interpretasi atau laporan penelitian.

Afrizal mengatakan, metode penelitian kualitatif memahami realitas sosial sebagai realitas subyektif dan intersubyektif, dapat mengkaji bagaimana manusia memandang dirinya dan realitas sosial. Afrizal juga mengutip Chadwick mengatakan bahwa pendekatan kualitatif mampu menemukan defenisi situasi serta gejala sosial dari subyeknya, defenisi tersebut meliputi perilaku, motif subyek, perasaan dan emosi dari Creswell (1994) bahwa realitas sosial dipahami sebagai realitas yang dibangun oleh manusia (Afrizal, 2005: 12).

Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif yaitu sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang deskriptif berupa data-data tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2004: 4). Di dalam penelitian ini metode kualitatif dirasa cocok untuk mengkaji upaya-upaya WALHI dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, dimana penelitian ini berusaha mendeskripsikan secara sistematis bagaimana hubungan WALHI dalam membangun

kesadaran masyarakat. Realitas sosial mungkin saja mengalami perubahan sesuai dengan situasi sosial yang ada.

1.6.1. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan mengacu pada perspektif teoritis yang dipakai oleh para peneliti dalam melakukan penelitian. Sedangkan metode penelitian merupakan cara yang dipakai oleh para peneliti untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban atas masalah-masalah penelitiannya Sebagaimana yang disampaikan oleh Afrizal (2014: 11). Rencana penelitian ini mencoba mendeskripsikan upaya WALHI dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Untuk tipe penelitian yang akan dipakai dalam rencana penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yakni penelitian yang bermaksud memberi gambaran mendalam, sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penggunaan metode ini memberikan peluang untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, catatan dan memo guna menggambarkan subjek penelitian.

Menurut Whiney penelitian deskriptif merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap-sikap, pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Adapun

tujuandari penelitian yang bertipe deskriptif adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan.

Penelitian yang bersifat deskriptif ini berusaha menggambarkan dan menjelaskan secara rinci mengenai upaya WALHI Sumatera Barat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam melakukan penelitian dengan menggunakan tipe penelitian ini, peneliti mendeskripsikan secara keseluruhan data yang didapat dari lapangan mulai dari apa yang menjadi upaya WALHI Sumatera Barat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penyelamatan lingkungan, bagaimana advokasi PLTN ombilin di Sawahlunto dilakukan, apa saja yang menghambat upaya WALHI Sumatera Barat, serta hasil atau realisasasi dari upaya advokasi yang dilakukan oleh WALHI Sumatera Barat tersebut.

1.6.2. Informan Penelitian

Informan berguna untuk mendapatkan informasi sedetail mungkin berdasarkan kebutuhan peneliti. Menurut Moleong (2004: 132) mendefinisikan bahwa informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Ia merupakan anggota tim yang dengan kebaikannya dan kesuka-relaannya ia dapat memberikan pandangan dari segi orang-dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian tersebut.

Afrizal (2014: 139) menambahkan pengertian informan penelitian yaitu orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Kata informan harus dibedakan dari kata responden. Informan adalah orang-orang yang akan memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian, sedangkan responden adalah orang-orang yang hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan pewawancara bukan memberikan informasi atau keterangan. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai upaya penyelamatan lingkungan dengan menggunakan advokasi, maka peneliti menggunakan informan sebagai subyek penelitian.

Pemilihan informan dilakukan dengan metode tertentu yang tujuannya untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan menggali informasi yang menjadi dasar penulisan laporan. Oleh karena itu peneliti menggunakan teknik pemilihan informan dengan menggunakan teknik purposive sampling (pemilihan informasi secara sengaja) yaitu mewawancarai informan dengan sengaja oleh peneliti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian dan keadaan mereka diketahui oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini adalah pengurus WALHI yang terlibat secara aktif dalam kegiatan penyelamatan lingkungan khususnya pada advokasi tambang dan energi.

Jumlah informan dalam penelitian ini mengacu kepada sistem pengambilan informan dalam prinsip penelitian kualitatif, dimana jumlah informan tidak ditentukan sejak awal dimulainya penelitian, tetapi setelah penelitian ini

selesai. Wawancara dihentikan ketika variasi informan yang diperkirakan tidak ada lagi di lapangan serta data atau informasi yang diperoleh sudah menggambarkan pola dari permasalahan yang diteliti.

Tabel 1.2

Data Informan:

No	Nama	Keterangan
1	Yoni Chandra	Ketua advokasi tambang dan energi
2	Zulpriadi	anggota divisi andokasi tambang dan energi
3	Tommy Adam	anggota divisi pemograman
4	Jusmaniar	masyarakat Sijantang
5	Asma	masyarakat Sijantang

1.6.3. Data yang diambil

Menurut Lofland yang dikutip oleh Maleong bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan data yang utama, yang nantinya akan didapat dengan bantuan pengambilan gambar atau foto. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer atau data utama merupakan data atau informasi yang didapatkan langsung dari informan penelitian dilapangan. Data primer didapatkan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam (Moleong, 2004: 155). Dengan menggunakan teknik wawancara, peneliti mendapatkan data dan informasi-informasi penting yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang diperoleh berupa informasi-informasi dari informan yakni bagaimana upaya WALHI dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tambahan yang diperoleh melalui penelitian pustaka yakni pengumpulan data yang bersifat teori yang berupa pembahasan tentang bahan tertulis, literature hasil penelitian (Moleong, 2004: 159). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yakni dengan cara mempelajari bahan-bahan tertulis, literatur-literatur yang berkaitan, dan hasil penelitian. Data-data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain, seperti data-data yang diperoleh dari artikel-artikel maupun hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang tentu saja mempunyai kaitan dengan permasalahan penelitian.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan observasi.

1. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Wawancara adalah pertemuan langsung dengan informan penelitian serta mengumpulkan informasi dari hasil percakapan dengan informan. Maksud mengadakan wawancara menurut Lincoln dan Guba seperti yang dikutip oleh Moleong (2004:135) adalah mengkonstruksikan mengenai orang, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.

Wawancara mendalam adalah sebuah wawancara tidak berstruktur antara pewawancara dengan informan yang dilakukan berulang-ulang kali, sebuah interaksi sosial antara pewawancara dengan informan. Dengan berinteraksi dan menggali secara mendalam dapat menjelaskan fakta-fakta yang terdapat pada proses penelitian. Pertemuan dilakukan tidak dalam sekali pertemuan, tapi dilakukan berulang-ulang agar dapat menghasilkan informasi yang lebih baik. Dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik wawancara mendalam untuk memperoleh informasi tentang upaya yang dilakukan oleh WALHI Sumatera Barat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penyelamatan lingkungan. Wawancara dilakukan secara intensif dan berulang-ulang. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan data yang lebih obyektif. Sedangkan alat yang digunakan dalam melakukan wawancara mendalam adalah dengan recorder, pena, kertas, dan untuk observasi dengan menggunakan kamera.

Proses wawancara di lapangan dilakukan pada saat informan tidak dalam keadaan sibuk beraktivitas. Dengan demikian informan dapat memberikan informasi atau data yang dibutuhkan tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Dalam melakukan wawancara peneliti memulainya dengan ketua advokasi dan tambang

WALHISumatera Barat, dilanjutkan dengan anggota bidang advokasi dan tambang yang khusus menangani kasus di PLTU Ombilin Kota Sawahlunto. Wawancara pada umumnya dilakukan untuk satu orang dengan lama waktu berkisar antara 25- 50 menit, ketika wawancara berlangsung pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada informan adalah pertanyaan yang dibahas dalam penelitian ini. Sebelum wawancara, terlebih dahulu memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dari penelitian supaya berjalan lancar.

Wawancara terhadap informan diawali dengan menanyakan identitas informan, dilanjutkan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan, pertanyaan di bagi menjadi beberapa bagian yang menjadi landasan penelitian. Pedoman wawancara disusun terlebih dahulu sebelum peneliti terjun ke lokasi penelitian, berupa pedoman wawancara (*interview guide*) yang berisi mengenai pokok-pokok pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan penelitian, antara lain mengenai upaya WALHI Sumatera Barat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelamatan lingkungan khususnya yang terjadi pada advokasi tambang dan energi di PLTU Ombilin Kota Sawahlunto. Dalam proses wawancara menggunakan alat bantu yaitu *block note*, alat tulis, *tape recorder* dan kamera.

Ketika wawancara berlangsung hasil wawancara di catat dalam bentuk catatan ringkas dan merekam hasil wawancara yang dilakukan. Setelah wawancara selesai sesampainya di rumah, hasil wawancara tersebut dilihat dan diperdengarkan kembali dan diperluas dalam bentuk catatan lapangan. Catatan lapangan di catat secara detail

dan mengingat kembali segala hal yang tidak tercatat pada catatan lapangan (James Spradley, 1997: 95-96).

2. Observasi

Observasi merupakan suatu aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Metode observasi dipilih karena dapat memahami relitas sosial dan interaksi sosial, dapat menyimpulkan hal-hal yang bersifat intra-subyektif dan inter-subyektif yang timbul dari tindakan aktor yang diamati. Pada penelitian ini peneliti memberitahukan maksud penelitian kepada kelompok yang diteliti, cara observasi seperti yang disebut dengan *participant as observer*. Data yang terdapat dalam metode penelitian kualitatif terdiri dari pembicaraan-pembicaraan orang atau data lisan, tulisan-tulisan (tulisan di media, surat-menyurat, kebijakan pemerintah, dll), aktivitas yang dilakukan orang, isyarat-isyarat yang disampaikan orang dan ekspresi fisik seperti raut muka ketika marah atau gembira (Afrizal, 2005: 8).

Ada beberapa alasan digunakannya sebagai teknik pengumpulan data sebagaimana yang dikutip oleh Moleong dari Lincoln dan Guba, sebagai berikut:

- Teknik pengamatan berdasarkan berdasarkan atas pengamatan secara langsung
- Teknik pengamatan memungkinkan melihat, mengawasi sendiri, mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya
- Memungkinkan peneliti mencatat peristiwa langsung dari data

- Menghilangkan keraguan terhadap hasil wawancara
- Memungkinkan peneliti memahami situasi-situasi rumit
- Pada situasi khusus tersebut tidak memungkinkan komunikasi lainnya

Melalui observasi ini peneliti memperoleh data-data yang tidak didapat dari wawancara. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengobservasi upaya yang dilakukan oleh WALHI Sumatera Barat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelamatan lingkungan, bagaimana WALHI Sumatera Barat berupaya menggalang dukungan publik dan mendatangi masyarakat yang terdampak dari kerusakan lingkungan serta mendampingi masyarakat yang terpinggirkan.

3. Pengumpulan Data

Para peneliti mengumpulkan bahan tertulis seperti berita di media, notulen-notulen di rapat, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan. Pengumpulan dokumen ini mungkin dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam. Tanggal dan angka-angka tertentu lebih akurat dalam surat atau dokumen ketimbang hasil wawancara mendalam. Bukti-bukti tertulis tentu lebih kuat dari informasi lisan untuk hal-hal tertentu, seperti janji-janji, peraturan-peraturan, realisasi sesuatu atau respon pemerintah atau perusahaan terhadap sesuatu (Afrizal, 2014:21)

1.6.5. Unit Analisis

Dalam riset ilmu sosial, hal yang penting adalah menentukan suatu yang berkaitan dengan apa atau siapa yang dipelajari. Persoalan tersebut bukan

menyangkut topik riset, tetapi apa yang disebut dengan unit analisis. Dari unit analisis itulah data diperoleh, dalam arti kepada siapa atau apa, tentang apa, proses pengumpulan data diarahkan. Unit analisis dalam suatu penelitian berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan pengertian lain objek yang diteliti ditentukan dengan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis juga berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau menentukan kriteria dari objek yang diteliti dari permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dapat berupa individu, masyarakat, lembaga (keluarga, perusahaan, organisasi, negara dan komunitas). Unit analisis dari penelitian ini yaitu lembaga WALHI.

1.6.6. Analisis Data

Analisis data adalah aktifitas yang terus-menerus dalam melakukan penelitian kualitatif. Analisa data dilakukan bersama-sama dengan pengumpulan data sehingga pengumpulan data analisa berlangsung dari awal sampai akhir penelitian. Data tersebut sudah dikumpulkan dalam beraneka ragam cara seperti observasi, wawancara dan dokumen.

Menurut Miles dan Huberman analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Analisis selama pengumpulan data memberikan kesempatan pada peneliti lapangan untuk pulang balik antara memikirkan tentang data yang ada dan menyusun strategi guna mengumpulkan data. Model ideal bagi pengumpulan data dan analisis data adalah sebuah model yang jalin-menjalin diantara

keduanya sejak awal. Kunjungan lapangan dilakukan secara berkala dan diselang-seling dengan saat diadakannya pengumpulan data serta penyajian data untuk penarikan kesimpulan (Miles, 1992:73-74).

Dalam hal ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis data Miles dan Huberman. Secara garis besar, Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap yaitu, kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berikut akan disajikan secara mendetail ketiga tahap tersebut dan akan dijelaskan pula cara-cara melakukan setiap tahapannya.

Tahap kodifikasi data merupakan tahap pengkodean terhadap data. Hal ini mereka maksud dengan pengkodean data adalah peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Hasil kegiatan tahap pertama adalah diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. Tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami penamaan oleh peneliti. Cara melakukannya adalah peneliti harus menulis ulang catatan-catatan lapangan yang mereka buat, setelah itu peneliti memilih informasi yang penting dan tidak penting tentunya dengan memberikan tanda-tanda.

Tahap penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan peneliti berupa kategori atau pengelompokan. Miles dan Huberman menganjurkan menggunakan matrik dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian lebih efektif. Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan suatu wawancara atau sebuah dokumen.

Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan (Afrizal, 2014 : 178-180).

Proses analisis data dimulai dari berbagai sumber, yakni wawancara mendalam kemudian data disusun berdasarkan pengkodean dan pengelompokan yang sudah ditentukan. Data yang belum jelas kemudian dibaca kembali dari sumber yang relevan. Setelah selesai membaca kembali hasil pengelompokan ditulis dalam bentuk sederhana dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sehingga bisa ditelaah dengan teori yang sesuai pada masalah penelitian ini.

Analisis merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian kualitatif, analisa data bersifat terbuka dan fleksibel yang disesuaikan dengan data yang ditemukan di lapangan. Analisa merupakan proses penyusunan data, supaya data dapat ditafsirkan oleh peneliti. Menyusun data berarti mengelompokkan data ke dalam pola-pola atau kategori-kategori. Sedangkan interpretasi artinya memberi makna pada analisa dalam menjelaskan pola-pola kategori, dan mencari hubungan antar berbagai konsep (Nasution, 1998:). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tabulasi data, maka analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan harapan mampu memberikan suatu penjelasan konkrit mengenai masalah yang diteliti.

Analisis data dilakukan dari awal sampai akhir penelitian, di mana data sudah dapat dikatakan jenuh. Data yang dikumpulkan dari lapangan diklasifikasikan secara sistematis dan dianalisis menurut kemampuan interpretasi peneliti dengan dukungan

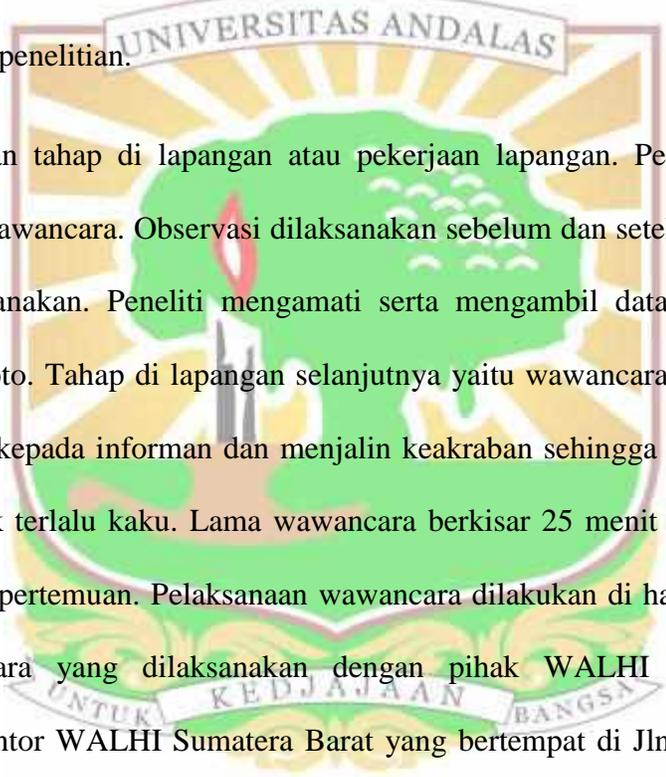
data primer dan data sekunder yang ada berdasarkan kajian teoritis yang relevan. Analisis data yang dilakukan oleh penulis yaitu: pertama, peneliti menulis hasil dari catatan lapangan. Kemudian, catatan lapangan diperluas dan peneliti menandai bagian yang penting dari catatan lapangan tersebut. Kemudian, peneliti melakukan analisa dengan melihat hubungan poin-poin penting yang disampaikan oleh informan dengan pertanyaan peneliti. Peneliti juga melihat temuan dari dokumen-dokumen baik berupa surat-surat, berita, dan notulensi. Setelah menganalisis dokumen dan melakukan analisis terhadap catatan lapangan kemudian peneliti mengambil kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Dari hasil analisis wawancara mendalam di dukung oleh analisis dokumen, maka diperoleh tentang upaya WALHI Sumatera Barat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penyelamatan lingkungan khususnya pada kasus advokasi tambang dan energi di PLTU Ombilin Kota Sawahlunto.

1.6.7. Proses penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membagi tiga tahap proses yang dilalui dalam penelitian ini dimulai dari awal sampai akhir penelitian. Tahap-tahap tersebut adalah tahap pra lapangan, tahap di lapangan atau pekerjaan lapangan, dan terakhir adalah tahap pasca lapangan (analisis data).

Pada tahap pra lapangan, penulis memulai dengan pembuatan dan penyusunan rancangan penelitian atau disebut juga dengan proposal penelitian. Setelah bimbingan dengan kedua dosen pembimbing maka pada proposal diseminarkan. Setelah lulus ujian proposal, penulis mengurus surat-surat penelitian untuk turun ke lapangan.

Setelah surat penelitian dikeluarkan oleh fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, peneliti mulai memasukkan surat ke lembaga dan instansi terkait. Sebelum turun ke lapangan, penulis terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan penelitian dan menyusun daftar data yang dibutuhkan serta cara pengambilannya, dari daftar tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa data yang akan di ambil diperoleh di kantor WALHI Sumatera Barat. setelah itu peneliti mulai melakukan penelitian sesuai dengan rencana metode penelitian.



Kemudian tahap di lapangan atau pekerjaan lapangan. Peneliti melakukan observasi dan wawancara. Observasi dilaksanakan sebelum dan setelah ujian seminar proposal dilaksanakan. Peneliti mengamati serta mengambil data berupa catatan, dokumen dan foto. Tahap di lapangan selanjutnya yaitu wawancara, dimulai dengan perkenalan diri kepada informan dan menjalin keakraban sehingga percakapan lebih santai dan tidak terlalu kaku. Lama wawancara berkisar 25 menit sampai 50 menit dalam satu kali pertemuan. Pelaksanaan wawancara dilakukan di hari yang berbeda-beda. Wawancara yang dilaksanakan dengan pihak WALHI Sumatera Barat dilakukan di kantor WALHI Sumatera Barat yang bertempat di Jln. Beringin III A, No. 9, Lolong Padang, Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, kota Padang, sedangkan wawancara dengan masyarakat yang terdampak di sekitar PLTU Ombilin dilakukan di kediaman informan.

Tahap terakhir dari penelitian ini adalah tahap pasca lapangan. Tahap ini merupakan tahap yang rumit dan memakan waktu yang lama. Di sini penulis

mencoba mengklasifikasikan atau mengelompokkan data-data yang didapat di lapangan. Setelah dikelompokkan, penulis membuat suatu kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Hasil kesimpulan yang diperoleh, kemudian disajikan dalam bentuk tulisan ilmiah yang melalui perbaikan-perbaikan serta arahan-arahan dari dosen pembimbing dan dosen penguji, yang akhirnya menjadi sebuah skripsi.

1.6.8. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai setting atau konteks sebuah penelitian. Tempat tersebut tidak selalu mengacu pada wilayah, tetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014: 128). Dalam penelitian ini lokasi penelitiannya adalah lembaga lingkungan yaitu WALHI Sumatera Barat yang menjadi fokus dari penelitian ini, sementara itu PLTU Ombilin di kota Sawahlunto adalah contoh kasus advokasi yang ditangani WALHI Sumatera Barat beberapa tahun terakhir, serta menjadi tempat yang juga mendukung penelitian ini.

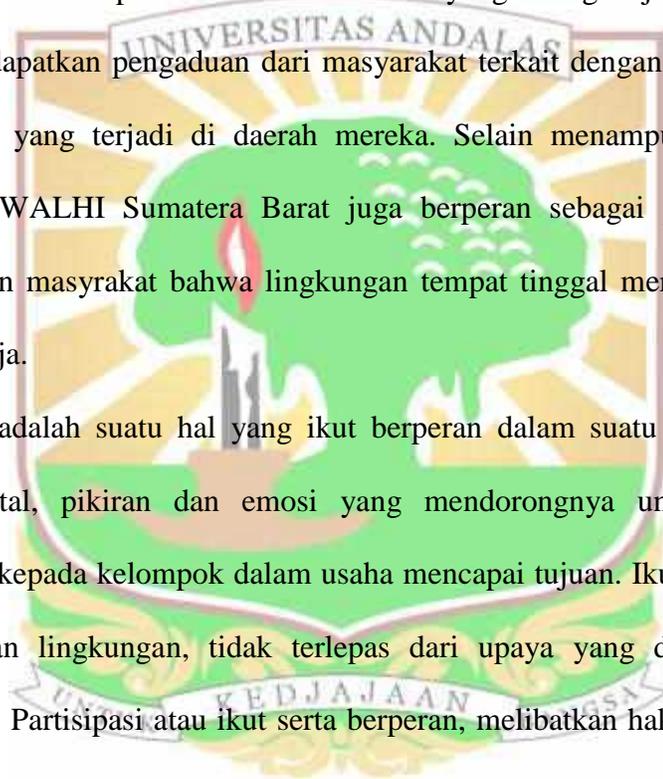
1.6.9. Definisi Operasional Konsep

Untuk mengarahkan penelitian ini, konsep yang dipakai didefinisikan sebagai berikut:

- a. Upaya, adalah cara atau suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar. Dengan demikian yang dimaksud dengan upaya yang dilakukan oleh WALHI Sumatera Barat adalah suatu usaha yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk

memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar demi menyelamatkan lingkungan.

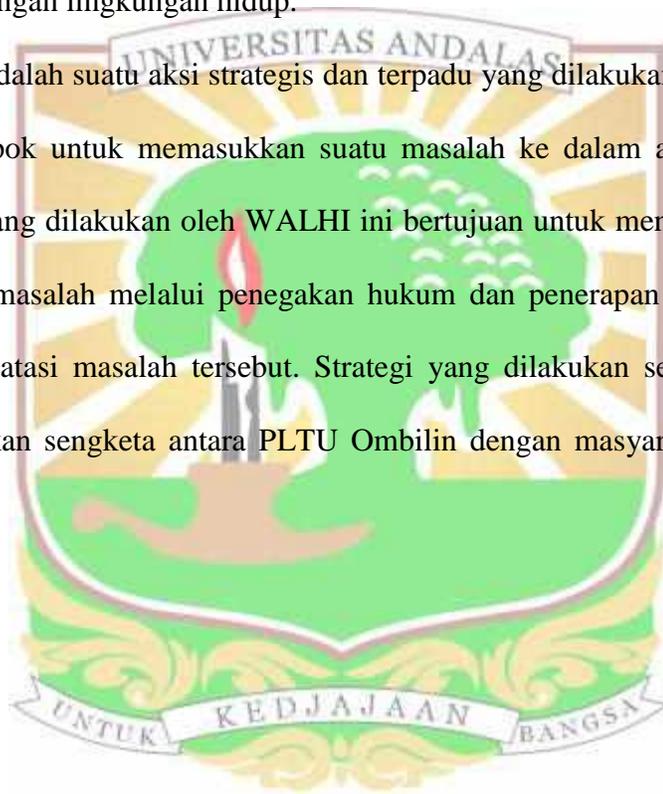
- b. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat, adalah sebuah lembaga yang lahir dengan semangat untuk mengangkat isu-isu lingkungan dan memberikan advokasi kepada masyarakat yang lingkungannya mengalami kerusakan akibat eksploitasi dan modernisasi yang sering terjadi. WALHI telah sering mendapatkan pengaduan dari masyarakat terkait dengan pengrusakan dan pencemaran yang terjadi di daerah mereka. Selain menampung keluhan dari masyarakat, WALHI Sumatera Barat juga berperan sebagai penggerak dalam menyakinkan masyarakat bahwa lingkungan tempat tinggal mereka sedang tidak baik-baik saja.
- c. Partisipasi, adalah suatu hal yang ikut berperan dalam suatu kegiatan, terlibat secara mental, pikiran dan emosi yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan. Ikut berperan dalam penyelamatan lingkungan, tidak terlepas dari upaya yang dilakukan, seperti memelihara. Partisipasi atau ikut serta berperan, melibatkan hak suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta melibatkan dan menyatukan masyarakat.
- d. Masyarakat, adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup dan semi terbuka, di mana sebagian interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Masyarakat yang dibahas di



dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki dampak langsung dari kerusakan lingkungan PLTU Ombilin.

e. Penyelamatan Lingkungan, adalah suatu upaya untuk memperbaiki lingkungan yang rusak atau yang mengalami krisis lingkungan hidup. Penyelamatan lingkungan dilakukan untuk mengurangi krisis serta menjaga keutuhan dan keberlangsungan lingkungan hidup.

f. Advokasi, adalah suatu aksi strategis dan terpadu yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok untuk memasukkan suatu masalah ke dalam agenda kebijakan. Advokasi yang dilakukan oleh WALHI ini bertujuan untuk mengupayakan solusi bagi suatu masalah melalui penegakan hukum dan penerapan kebijakan publik untuk mengatasi masalah tersebut. Strategi yang dilakukan semata-mata untuk menyelesaikan sengketa antara PLTU Ombilin dengan masyarakat sekitar yang terdampak.



1.6.10. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Jadwal penelitian ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan dalam penelitian karya ilmiah (skripsi), untuk lebih jelas ada pada tabel dibawah:

no	Nama kegiatan	2019					2020		
		Jan-	Mar	Apr	Mei-	Des	Jan-	april	mei
1	Penelitian lapangan								
2	Analisis data								
3	Bimbingan dan penulisan skripsi								
4	Ujian skripsi								

